

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2024					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tema Pengentasan Kemiskinan																
1	Masih rendahnya Pemahaman Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tentang tata kelola manajemen usaha, mutu produk, akses pemasaran, akses permodalan dan jumlah umkm yang berbadan usaha.	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Prosentase Pertumbuhan UMKM	0.76%	Pelatihan UMKM	Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		60			60	Terkait Langsung	169,014,000	BAPPEDA	Dinas Koperasi UKM
					Pelatihan UMKM	Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	180	30			210	Terkait Langsung	1,006,661,967	BAPPEDA	Dinas Koperasi UKM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2024					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana		
						Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Tema Peningkatan Investasi																	
1	Masih rendahnya kesadaran Pengurus Koperasi terhadap kewajiban memiliki izin serta rendahnya pemahaman dan ketrampilan pengurus terhadap proses perizinan simpan pinjam koperasi	Meningkatnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Prosentase koperasi simpan pinjam/unit simpan yang memiliki ijin usaha	86.44%	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	4	4				8	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	155,503,000	DPMPTSP	Dinas Koperasi, UKM
					Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Unit Usaha	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5	5				10	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama			171,497,000
2	Masih rendahnya omzet koperasi	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Volume Usaha Koperasi	6,025 T	Inkubator Bisnis Koperasi dan UKM	Koperasi	Jumlah Koperasi Diberdayakan			40		40	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	424,113,700		Dinas Koperasi, UKM	
3	Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase Pertumbuhan UMKM	0.76%	Temu Bisnis Peningkatan Kerjasama Investasi UMKM	Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil diberdayakan	40				40	terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama	43,110,000		Dinas Koperasi, UKM	

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No.	Permasalahan	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2024					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana	
						Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tema Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)																
	Masih rendahnya volume usaha pelaku usaha kecil	Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Persentase Pertumbuhan UMKM	0.76%	Peningkatan Pelayanan PLUT-KUMKM	Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil Diberdayakan						terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	278,194,042	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Koperasi, UKM
		Meningkatnya Pengembangan Usaha Kecil	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	1.05%	Penyelenggaraan Pameran/Promosi Produk UKM	Even	Jumlah Even Pameran yang Diselenggarakan						terkait langsung dengan masyarakat/stakeholder utama	165,370,000		Dinas Koperasi, UKM

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

No	Sasaran (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023)	Kegiatan Utama Level Mikro (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023)	Kegiatan Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Indikator KU	Target tahunan 2024	Rencana Aksi (Program Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Output		Target 2024					Jenis Kegiatan Aksi* (terkait atau tidak terkait langsung dengan masyarakat/ stakeholder utama)	Anggaran (Rp)	Pelaksana		
							Satuan	Indikator	TW 1	TW II	TW III	TW IV	Total			Instansi Koordinator	Instansi Pelaksana	
1							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel																		
Indikator SS.1 : Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan																		
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	4,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh PD
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja				Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Pembangunan Zona Integritas di unit kerja		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)				Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Implementasi SPIP		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat				Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Pengelolaan Pengaduan Masyarakat		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi				Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi		1				1	Tidak terkait langsung dengan masyarakat	-	Inspektorat	Seluruh PD
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah				1. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Tugas	25	50	75	100	100	Tidak Terkait langsung dengan masyarakat	148,228,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD	
						2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	50	75	100	100	Tidak Terkait langsung dengan masyarakat	1,273,687,502	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD	
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase BMD dalam kondisi baik	25	50	75	100	100	Tidak Terkait langsung dengan masyarakat	209,543,000	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh PD	
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional																		
Indikator SS.2 : Nilai Employer Branding ASN, Indeks BerAKHLAK, Nilai Survei Penilaian Integritas, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat																		
S.7	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen	Penguatan Sistem Merit															BKD	
		Pelaksanaan Core Values ASN															Biro Organisasi	1. Biro Organisasi 2. BKD 3. BPSDM
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima				Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	1 Dokumen	Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima		1				1	Terkait langsung dengan masyarakat	-	Biro Organisasi	Seluruh PD